

Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2017

¹Muhamad Rizky Wijaya, ²Farid Addy Sumantri

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan
Jl. Raya Serang Km. 10 Bitung, Curug, Tangerang, Banten, Indonesia 15810

²Fakultas Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma
Jalan Imam Bonjol No.41 Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Indonesia 15115

¹Rizkyjaya11@gmail.com, ²Farid_addy@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana Pengaruh *corporate governance* (CG) dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Pengukuran CG di proxy dengan ; Kepemilikan Manajemen dan Dewan Direksi Independen, Kualitas Audit diukur dengan KAP *the big four* dan *non the big four*, sedangkan pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan CETR.

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 9 perusahaan industri metal dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat bantu program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) for windows versi 21.

Hasil penelitian menunjukkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai ρ value sebesar $0,000 < 0,050$. Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai ρ value sebesar $0,644 > 0,050$ dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai ρ value sebesar $0,359 > 0,050$.

Kata kunci : Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajemen, Kualitas Audit, CETR.

I. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Suandy

(2014:21), perlawanan terhadap pajak terbagi atas dua yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan aktif pada umumnya tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan pajak secara aktif terbagi atas dua, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Taxevasion atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum, *tax evasion* merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian

transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah.

Sedang *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran atau meminimalan pajak yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku. Pengukur *tax avoidance* menggunakan rumus *Book Tax Different*. *Book tax different* merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Bovi, 2005).

Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah mengembangkannya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin keta, pengusaha kan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan dipengaruhi oleh *corporate governance* (Annisa, 2012).

Ukuran pertama dalam penerapan *corporate governance* adalah kepemilikan manajerial. Menurut Untung dan Hartini (2006), Kepemilikan manajerial (*Managerial Ownership*) merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Dengan adanya kepemilikan manajerial tentunya akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham serta akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham (Imanta dan Satwiko, 2011).

Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh

dewan direksi dan manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri dan membuat risiko perusahaan semakin kecil dimata kreditur (Asmawati dan Amanah, 2013)

Ukuran kedua dalam penerapan *corporate governance* adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada. Komisaris independen dinyatakan dengan persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang berada di suatu perusahaan.

Ukuran ketiga dalam penerapan *corporate governance* adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris, dimana tanggung jawab komite audit memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Menurut beberapa peneliti seperti Daniri (2005), Pohan (2008), yang kemudian

diangkat lagi oleh Annisa dan Kurniasih (2012). dalam penelitian tersebut, pengukuran *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagi proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Dengan menggunakan pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip *corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility dan independency*. Sedangkan proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *book tax gap*.

Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit yang berpengaruh dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan masih harus dikaji karena terdapat inkonsistensi dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap aktivitas *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Ratna (2013) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin sedikit (Winata, 2014).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tjun (2012) juga menyatakan bahwa kualitas audit adalah sesuatu kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Berdasarkan pengertian kualitas audit yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu kualitas audit merupakan suatu tolak ukur bagi seorang auditor dalam melakukan pengauditan ke laporan keuangan dan hal ini perlu diperhatikan oleh seorang auditor.

Menurut Nilawati (2014) mengungkapkan bahwa kualitas audit yang baik itu dapat dicapai apabila auditor mematuhi standar-standar dan etika yang berlaku pada profesi auditor. Maka dari itu seorang audit harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat agar kualitas audit yang akan diperoleh nanti akan menjadi baik dan dapat dipercaya oleh pemegang kepentingan.

II. Landasan Teori

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara *prinsipal* dan *agen*. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai *prinsipal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para *agen* diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan

Pramuka, 2010). Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong timbulnya biaya keagenan. Biaya tersebut dapat berupa pertama, pengeluaran untuk mengawasi agen, yaitu pengeluaran yang terkait dengan fungsi pemantauan terhadap agen.

2. *Corporate Governance*

Definisi *corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004), yang mendefinisikannya sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), konsep *good corporate governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*shareholders*).

Untuk mencapai tujuan diterapkannya *corporate governance*, maka dibentuklah suatu sistem dan susunan tugas dan wewenang dewan komisaris dan komite audit agar *corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pembentukan dewan komisaris dan komite audit ini merupakan suatu bentuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan untuk meningkatkan keakuratan dan kehandalan dari informasi keuangan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik, disebutkan bahwa dalam penyampaian laporan tersebut emiten harus memuat laporan pelaksanaan kerja dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari laporan *corporate governance*.

Informasi-informasi yang dipaparkan antara lain jumlah rapat, tingkat kehadiran dan jumlah anggota dalam dewan komisaris maupun komite audit. Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat meminimalisir praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan, dimana hal tersebut dapat merugikan pengguna laporan keuangan karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi bias dan tidak akuntabel.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak, yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak (Chairil, 2011). 20 Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Prebble dan Prebble (2012), perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah *illegal*, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal.

4. Kepemilikan Manajerial

Teori keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer.

Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua beaj pihak. Keberadaan manajer perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda. Pertama pihak yang mewakili pemegang saham institsional, sedangkan kedua, tenaga-tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, dan pihak yang duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.

Menurut Downes dan Goddman (2000) dalam Sukirni (2012), kepemilikan manajerial yaitu : “para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dan pemilik manajer secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan”. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan per 19 serta pengambilan keputusan. Pengertian manajerial menurut (Diyah dan Emas, 2009) sebagai berikut “kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).”

Biasanya manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi tersebut. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa kinerja perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Menurut Darwis (2009) pengertian kepemilikan manajerial adalah “pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris)”.

5. Dewan Komisaris Independensi

Dalam pedoman umum *good corporate governance* (2006:13)

pengertian komisaris independen sebagai berikut : “anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan”.

Menurut Riduwan dan Sari (2013) komisaris independen : “Anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.”

Anisa dan Kumiasih (2012) dalam Atsil (2015) komisaris independen didefinisikan sebagai : “seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurangkurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi

dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan bebas dari hubungan bisnis. Selain itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial.

6. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Tjun (2012) juga menyatakan bahwa kualitas audit adalah sesuatu kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Berdasarkan pengertian kualitas audit yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu kualitas audit merupakan suatu tolak ukur bagi seorang auditor dalam melakukan pengauditan ke laporan keuangan dan hal ini perlu diperhatikan oleh seorang auditor.

Kualitas audit memberikan jaminan bahwa tidak terdapat salah saji material atau kecurangan-kecurangan dalam laporan audit (Solatiyah, 2014). Kualitas audit adalah kemungkinan auditor untuk menemukan dan mengungkapkan kesalahan atau pelanggaran yang bersifat material dalam Laporan Keuangan. Kualitas audit yang tinggi adalah ketika auditor mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dari Laporan Keuangan mengenai hal-hal yang memang tidak seharusnya terdapat pada Laporan Keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan audit yang mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa adanya salah saji material atau kecurangan lainnya.

Laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan adalah laporan yang berisikan informasi yang berkualitas yang mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Untuk menghasilkan informasi seperti itu, perlu dilakukan pemeriksaan yang berkualitas pula, atau dengan kata lain, informasi yang berkualitas dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas audit (Hamid, 2013).

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *the big four* lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* memiliki tingkat kecurangan pajak yang lebih rendah dibandingkan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP *non the big four* (Annisa dan Kurniasih 2012).

B. Kerangka Teoritis

Kerangka penelitian ini disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu *corporate governance*, yang di *proxy* dengan Kepemilikan Manajerial (X_1), dan Dewan komisaris Independen (X_2), serta Kualitas Audit (X_3). Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini *tax avoidance* yang di *proxy* dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

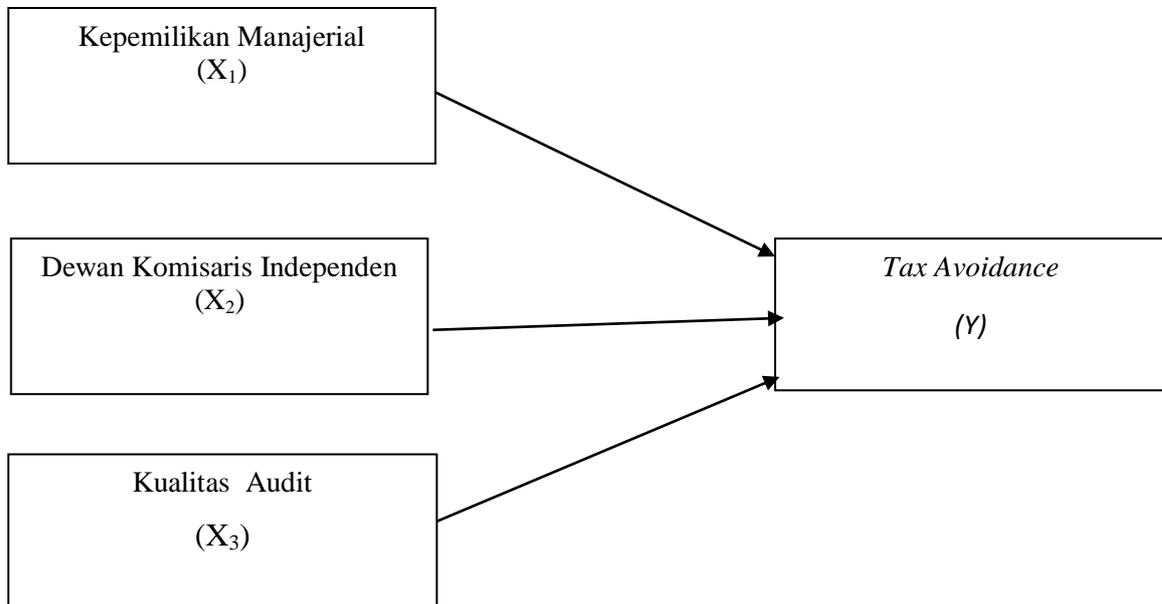
Anggitarani (2009) menyatakan salah satu aspek penting dalam *corporate*

governance adalah dewan komisaris pengurus perseroan atau *board of directors*. Indonesia menganut *two board system*, artinya komposisi dewan pengurus perseroan terdiri dari fungsi eksekutif yaitu dewan direksi, dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya.

Hasil penelitian Eva dan Amanah menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan *size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *cash effective tax rate*. Dapat disimpulkan semakin besar porsi kepemilikan saham oleh Manajerial akan meningkatkan peranan pengawasan yang dilakukan yang pada akhirnya akan meminimalisasi tindakan yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan *tax avoidance*.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan

klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Dalam setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan manajemen.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatkan kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga mengurangi perilaku oportunistik. Manajer akan ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Jao: 2011).

Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola lebih baik. Karena dengan banyak insentif, mereka akan lebih memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, akan lebih memikirkan strategi pajak yang diambil akan lebih agresif.

Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah (Timothy, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimala harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008; dalam Annisa, 2012). Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar presentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan presentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Hasil penelitian Widyaningdyah (2002) dalam Antonia (2008) juga yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar.

Berdasar kanuraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance*, yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water Cooper, Dloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012).

H₃: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

III. Metodologi Penelitian

A. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang digunakan untuk pengukuran *tax avoidance* diukur dengan CETR dan *corporate governance* yang diproxy dengan Kepemilikan Manajerial, dan Dewan komisaris independen, serta Kualitas Audit yang diukur dengan *the big four* dan *non the big four*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan laporan keuangan dan non laporan keuangan perusahaan manufaktur logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai dengan 2017.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2012:8) juga menjelaskan metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini Kepemilikan Manajerial (X_1), Dewan komisaris Independen (X_2), dan Kualitas Audit (X_3), variabel dependen adalah *Tax Avoidance* (Y). Didalam penelitian ini memerlukan adanya hipotesis yang kemudian akan diuji sesuai dengan tahapannya. Biasanya dimulai dari metode analisa data dan rumus statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesa.

C. Definisi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini digunakan berbagai variabel untuk melakukan analisis data, seperti variabel independen, dan variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit. Adapun pengertian dan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

a. Kepemilikan Manajerial

Merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham beredar yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari total saham beredar. Menurut Riduwan dan Sari (2013) Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$$

b. Dewan Komisaris Independen

Merupakan jumlah keanggotaan yang berasal dari luar perusahaan (*outside director*) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan yang diukur dengan persentase jumlah anggota *outside director* dari seluruh anggota dewan (persentase anggota dewan komisaris independen).

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota dari luar Perusahaan}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

c. Kualitas Audit

Dalam penelitian ini kualitas audit akan diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Ukuran KAP dilihat dari besar kecilnya perusahaan audit dilihat dari tergabungnya di *the big four* atau *non big four*. *Big four* untuk KAP besar dan *Non big four* untuk KAP kecil. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa auditor yang termasuk *big four* memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena fokus pada perlindungan reputasi dari nama mereka. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa KAP yang besar dapat menjamin independensinya dalam praktiknya. Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP *big four* sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Pemilihan KAP *big four* ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor.

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* diprosikan dengan menggunakan CETR. Perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan SPSS versi 21, mengacu pada (Ghozali, 2012) meliputi:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah proses pengumpulan dan peringkasan data, serta upaya untuk menggambarkan berbagai karakteristik yang penting pada data yang telah terorganisir tersebut. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2012: 19).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu dari grafik *normal probability plot*. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal maka data tersebut berdistribusi normal.

Untuk mengetahui apakah suatu data tersebut normal atau tidak secara statistik maka dilakukan uji normalitas menurut Kolmogorov-Smirnov satu arah atau analisis grafis. Uji Kolmogorov-Smirnov dua arah menggunakan kepercayaan 5%. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah adalah sebagai berikut:

- Apabila hasil signifikansi lebih besar (>) dari 0,05 maka data terdistribusi normal.
- Apabila hasil signifikansi lebih besar (<) dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2012), uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar

variabel bebas, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal* (nilai korelasi tidak sama dengan nol). Uji multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

c. Uji Heteroskedastisitas

Manurut Ghozali (2012), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji *park* dan uji *glejser*, dimana tingkat signifikansinya harus di atas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan ini ada tidaknya (Ghozali, 2006):

a). Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Adjusted R² dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda maka masing-masing variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan manajemen, dan komite audit secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu *casheffective tax rate* (CETR).

Besarnya R^2 adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel

dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika R^2 mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan prosentase tingkat kebenaran suatu prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan (Ghozali, 2012).

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (Nugroho, 2005). Rumus regresi linier berganda:

$$CETR = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 DKI + \beta_3 KA + \varepsilon$$

Dimana :

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (*Tax Avoidance*)

α = nilai konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi

KM = Kepemilikan manajerial

DKI = Dewan komisaris independen

KA = Kualitas Audit

ε = Standar error

Untuk menguji pengaruh parsial antara dewan komisaris independen terhadap *casheffective tax rate* (CETR), kepemilikan manajerial terhadap *cash effective tax rate* (CETR), dan komite audit terhadap *casheffective tax rate* (CETR) dengan $\alpha = 5\%$. Menurut Priyatno (2011: 78-79) untuk pedoman pengambilan keputusannya yaitu, bila hasil $t \text{ sig} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak yang artinya variabel tersebut signifikan, artinya terdapat pengaruh yang nyata. Bila $t \text{ sig} > 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya dewan komisaris independen, kepemilikan manajemen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *cash effective tax rate* (Y).

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Analisis Statistik Deskriptif

Dari hasil pengujian statistik deskriptif atas keempat variable tersebut melalui data asli, maka diperoleh hasil sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	54	,01	1,63	,3607	,38095
Kepemilikan Manajerial	54	,47	7,11	2,8165	1,36428
Dewan Komisaris Independen	54	,00	1,63	,2920	,35389
Kualitas Audit Valid (listwise)	54	,00	1,00	,3519	,48203

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah sample atau N data valid yang akan diteliti adalah 54 sampel. Dari data variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan model dari variabel dependen diperoleh rata-rata sebesar 0,3607 dengan nilai terendah sebesar 0,01 dan nilai tertinggi sebesar 1,63 dengan standar deviasi sebesar 0,38095. Semakin kecil nilai akrual suatu perusahaan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut semakin tinggi, sebaliknya semakin besar nilai akrual suatu perusahaan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut semakin tinggi. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian perusahaan sampel yang diteliti tingkat penghindaran pajak yang dilakukan cukup rendah.

Variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai minimum 0,47 dan nilai maximum sebesar 7,11.

Nilai rata-rata variabel dewan komisaris sebesar 2,8165 dengan standar deviasi sebesar 1,26428. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan kepemilikansaham yang dimiliki manajerial rata-rata masih cukup kecil. Dengan semakin kecilnya kepemilikan saham oleh Manajerial, maka dapat mengrongi pihak manajemen melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel kepemilikan manajemen memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maximum sebesar 1,63. Nilai rata-rata variabel kepemilikan manajemen adalah sebesar 0,2920 dengan standar deviasi sebesar 0,35389. Berdasarkan data diatas sebagian besar porsi dewan komisaris independen yang ada masih cukup kecil, maka pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen terhadap pihak manajemen masih belum maksimal, sehingga pihak manajemen cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel kualitas audit mempunyai nilai minimum 0,00 dan nilai maximum sebesar 1,00. Nilai rata-rata variabel komite adalah sebesar 0,3519 dengan standar deviasi sebesar 0,48203. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan sebagian sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diaudit oleh KAP *non the four*, sehingga peluang pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) cukup tinggi.

B. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji, apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi klasik, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Adapun pengujian total sampel data disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 hasil Uji Normalitas

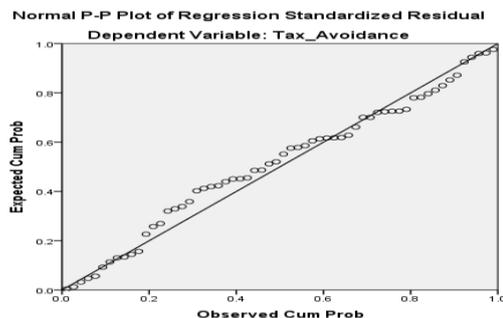
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,31302958
	Absolute	,284
Most Extreme Differences	Positive	,284
	Negative	-,232
Kolmogorov-Smirnov Z		2,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,240

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan nilai *Asymp Sig* sebesar 0,240 dan nilai variabel independen yang memiliki signifikan lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dilihat melalui *normal probability plot* yang penyebaran titik-titik variabelnya seharusnya berada tidak jauh di sekitar garis $Y=X$ dan histogram yang membentuk kurva normal (*normal curve*). Adapun grafik plot penelitian ini terlihat pada Gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1 Grafik P-P Plot

Dari Gambar 4.1, terlihat bahwa titik-titik variabel berada disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Adapun hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Linearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. Tidak Memiliki Manajerial	,934	1,071
2. Tidak Memiliki Komisaris Independen	,922	1,085
3. Tidak Memiliki Kulit Audit	,961	1,040

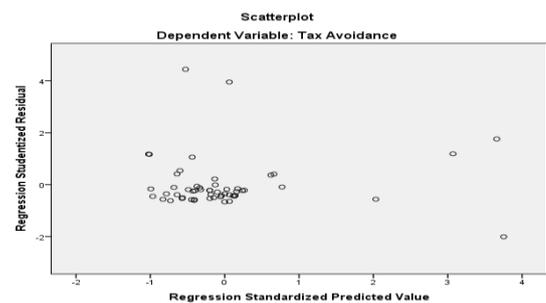
Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, *tolerance value* > 0,10 dan *VIF* < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terdapat hubungan multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini disajikan pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 4.2 Heterokedastisitas

Apabila dilihat dari grafik *scatterplot*, terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat diambil kesimpulan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian autokorelasi menggunakan Durbin-Watson untuk mencari ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian yaitu dengan membandingkan nilai DW_{hitung} dengan DW_{tabel} .

Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,211 ^a

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel di atas diketahui nilai DW_{hitung} sebesar 2,211. Dari hasil tabel Durbin Watson diketahui $n = 54$, $k = 3$ dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai DW_{tabel} $d_L = 1,4644$ dan $d_u = 1,16800$. Berdasarkan data tersebut diketahui nilai nilai dari uji Durbin Watson adalah $1,16800 < 2,211 < 2,989$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

5. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2012). Nilai yang digunakan adalah *adjusted R²* karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua buah. Adapun nilai *adjusted R²* dari hasil penelitian terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,284 dan semakin mendekati 0 yang berarti menunjukkan variabel kepemilikan manajerial, independen dewan komisaris independen, dan kualitas audit dapat dapat menjelaskan variabel dependen *tax avoidance*.

C. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji T) dilakukan untuk melihat

bagaimana pengaruh masing-masing variabel dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, variabel kepemilikan kanajerial terhadap *tax avoidance* dan variabel komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasil Uji t dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,269	,128		2,099	,041
Kepemilikan Manajerial	-,016	,034	-,056	-,465	,644
Dewan Komisaris Independen	,570	,130	,530	4,375	,000
Kualitas Audit	-,087	,094	-,110	-,926	,359

Dependent Variable: Tax Avoidance

1. Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien variabel dewan komisaris independen dengan signifikansi sebesar 0,644 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang diajukan dalam penelitian ditolak dan tidak terbukti.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa besar/kecil porsi kepemilikan saham manajemen dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,570 ^a	,325	,284	,32228

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data yang diolah

Mahulae, dkk (2016), dimana kepemilikan

tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial lebih kecil dari total saham perusahaan. Dimana sebagian besar perusahaan sampel yang diteliti untuk kepemilikan manajerial masih dibawah 30%. Dari Sembilan perusahaan sampel yang diteliti sebanyak 8 perusahaan jumlah kepemilikan saham manajerial berkisar 0,08 % s.d 25,15 %, kepemilikan saham manajerial yang memiliki porsi yang cukup besar hanya padan PT. Gunawa Dianjaya pada tahun 2015 dan 2016 jumlah kepemilikan saham manajerial 87,33%. Dengan semakin kecilnya persentase kepemilikan manajerial, maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait masalah perpajakan, oleh karena itu besar kecilnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajerial tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh pihak manajemen.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien variabel kepemilikan manajemen dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian diterima dan terbukti.

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa variabel komite audit independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar porsi dewan komisaris independen yang ada dalam perusahaan mampu melakukan

pengawasan yang cukup ketat terhadap pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin besar porsi dewan komisaris independen yang ada dalam perusahaan akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan, sehingga mampu menekan pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel komite audit dengan signifikansi sebesar 0,359 atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ditolak dan tidak terbukti.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Eksandy (2016) Sandy dan Lukviarman (2015), yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini variabel kualitas audit terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *the big four* (Price Water Cooper, Dloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012). Hal ini mengindikasikan hasil audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan KAP *The big four* dan *nonthe big four* tidak mempengaruhi terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan pihak manajemen.

V. Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

Dari hasil pengujian hipotesis terhadap seluruh variabel diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai *pvalue* sebesar $0,644 < 0,050$). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa H_2 yang diajukan dalam penelitian ditolak dan tidak terbukti.
- b. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai *pvalue* sebesar $0,000 < 0,050$). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa H_1 yang diajukan dalam penelitian diterima dan terbukti.
- c. Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai *pvalue* sebesar $0,359 > 0,050$). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa H_3 yang diajukan dalam penelitian ditolak dan tidak terbukti.

B. Keterbatasan

Keterbatasan - keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Periode penelitian relatif masih singkat hanya 6 (enam) tahun, yaitu selama periode 2012-2017.
- a. Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sub sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Pengukuran variabel independen (*corporate governance*) menggunakan proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajemen dan jumlah komite audit, dan pengukuran penghidaran pajak menggunakan CETR.
- c. Variabel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 3 variabel, yaitu dewan komisari independen, kepemilikan manajemen dan komite audit.

C. Saran

Agar penelitian ini dapat lebih baik kedepannya, maka berdasarkan

keterbatasan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Menambahkan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian ini dapat mengeneralisasi dan lebih baik.
- b. Agar menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak selain perusahaan industri sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Agar hasil penelitian dimasa yang akan datang lebih baik, disarankan untuk pengukuran CG menggunakan pengukuran lain, seperti *disclosure*, dan untuk penghidaran pajak menggunakan ukuran lain, seperti ETR.
- d. Agar hasil penelitian dimasa yang akan datang lebih baik, disarankan untuk menambah variabel independen seperti proporsi komite audit independen, kualitas audit, *leverage*, dan *size*.

Daftar Pustaka

- Annisa, Nuralifmida Ayu. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008)". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2011
- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8, No. 2, 95-189, 2012
- Boediono, Gideon, SB. "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur". Solo: *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 2005
- Batara Wiryo Pramudito, Maria M. Ratna Saru "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance", *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, Vol. 12. 3 Desember 2015.

- Darmawati. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Denpasar, 2004
- Dea Imanta dan Rutji Satwiko, 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 13, No, 1, April 2011.
- Dyreg, Scott et al. "The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance". *Social Science Research Network*, 2010
- Eksandy Array, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)", *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol,1, 2017.
- Erni, Masdupi. "Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik". Keagenan *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 20, No. 1: 57-69. 2005
- Fadhilah, Rahmi. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. 2014
- Faradhila Sitty Norriska, Pramono Dudi, dan Yudowati Priyandani Siska, Pengaruh Kepemilikan manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21.3. Desember, 2017
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. 2011
- Haruman, Tendi. "Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan Dana Nilai Perusahaan". Pontianak: *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 2008
- Hamid, Abdul. "Buku Panduan Penulisan Skripsi". Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2012
- Hartadinata, Okta. S. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2008-2010". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No.3 Desember 2013
- Herawati, Vinola. "Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel dari Pengukuran Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan". Pontianak: *SNAXI*. 2008
- Hendra P. Irawan dan Aria Fahmita, "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *Artikel. Universitas Indonesia*. Tahun 2012.
- Ilyas, B wirawan dan Richard Burton. "Hukum Pajak". Jakarta: Salemba Empat. 2006
- I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha, "Pengaruh Coporate Gavernace. Leverage, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19 No,1, Tahun 2014
- Isgiarta, Midiastuty dan Triatiarini. "Analisa Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. IAI. 2005
- Jao, Robert, Corporate governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan manufaktur Indonesia, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 1/November 2011.
- Jensen, Michael & Clifford Smith (1985), "Stockholder, Manager and Credit Interests: Applications of Agency Theory," in Altman and Subrahmanyam, eds, *Recent*

- Advances in Corporate Finance, Homeward : Richard Irwin.
- Jensen, G.R., D.P. Solberg, dan T.S. Zorn. 1992. "Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt and Dividen Policies". *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. 247-263.
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance, *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 18, No.1, Februari 2013.
- Mahulae Endari Endang, Dudi Pratomom Anisa Nurbaiti "Pengaruh Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance". *e-Proceeding of Management*, Vol 3 No.2, Agustus 2016
- Martina, Venti Yustianti. "Peran Corporate Governance dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba". *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol.9, No.3. 2009
- Midiastuty, P.P. dan Machfoedz, M. "Analisis hubungan mekanisme Corporate Governance dan indikasi Manajemen Laba". *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya. 2003
- Moh'd M.A., et.al. "The Impact of Ownership Structure on Corporation Debt Policy: A Time-Series Cross-Sectional Analysis". *The Financial Review*, 33, pp. 85-98. 1998
- Nugroho, Agung. "Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS". Yogyakarta: Andi. 2005
- Okta S. Hartadinata, "Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan utang, dan ukuran perusahaan terhadap Tax Aggressive pada perusahaan manufaktur di BEItahun 2008-2010", *e-Jurnal Unair.ac.id*, 2013
- Putri, Destika Maharani. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba". Skripsi S1, Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang. 2011
- Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016), "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance", *E-Jurnal Akuntansi Unviversitas Udayana*, 22.4, 2016.
- Pramudito, B.W dan M.M.R. Sari, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisari Terhadap Tax Avoidance" *Skripsi*, Universitas Udayana Bali, 2015.
- Santoso, Singgih. "Masterin SPSS Versi 17". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2009
- Siallagan, Hamongan dan Machfoeds, Mas'ud. "Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang. 2006
- Siswantaya, I Gede. "Mekanisme Corporate Governance dan Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Tesis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang. 2007
- Scott et al. 2010. *Long Run Corporate Tax Avoidance. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*.
- Suandy, Erly. "Perencanaan Pajak". Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Sumarsan, Thomas. "Perpajakan Indonesia". Jakarta: Indeks. 2010
- Surya, Indra dan Yustia vandana, Ivan. "Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha". LKPMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008

- Tjun, Tjun, Lauw et al ‘‘Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit’’. Bandung. Universitas Kristen Maranatha. *Jurnal Akuntansi* Vol.4, No.1 (Mei) Hal. 33-56, 2012.
- Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari, ‘‘Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance’’ *Buletin Studi Ekonomi*, Tahun 2013.
- Ujiyantho, Arif Muh. dan B.A. Pramuka. ‘‘Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan’’. *Symposium Nasional Akuntansi X*, Makasar. 2007
- Waluyo, ‘‘Perpajakan Indonesia’’. Edisi 9. Jakarta: Salemba empat. 2010
- Warsidi dan Bambang Agus Pramuka (2000). ‘‘Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa Yang Akan Datang’’ *Jurnal akuntansi dan Ekonomi*, Vol.2, No.1
- Zain, Mohammad. ‘‘Manajemen Perpajakan’’. Jakarta: Salemba Empat. 2003